



TRIBUN JOGJA/HASAN SAKRI

**TUNTUT NETRALITAS PNS** - Massa aksi menggelar aksi unjuk rasa tentang dugaan ketidaknetralan oknum PNS Kota Yogyakarta di depan Balai Kota Yogyakarta, Rabu (1/3). Massa menuntut pemerintah Kota Yogyakarta bersikap tegas atas adanya oknum PNS yang tidak netral dalam Pilkada Kota Yogyakarta.

## Massa Bawa Foto PNS Diduga Tak Netral

**YOGYA, TRIBUN** - Forum Pengawal Demokrasi Indonesia menggelar aksi turun ke jalan dari Polsek Gondomanan, Jalan Melati Wetan No 6, Gondokusuman, Balciro, Yogyakarta, menuju Balai Kota Yogyakarta di jalan Kenari No 56, Muja Muju, Rabu (1/3).

Aksi ini dilakukan terkait dugaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

2017 kemarin. Mereka menuntut dan menagih janji Wali Kota yang melakukan pengawasan netralisasi PNS. Selain itu, Wali Kota juga diminta bertindak tegas PNS yang melanggar dalam pilkada itu.

Puluhan orang dalam aksi tersebut menyampaikan keinginan mereka untuk bertemu Walikota Yogyakarta. Mereka

● ke halaman 14

## Massa Bawa

• Sambungan Hal 13

membawa barang bukti berupa foto beberapa orang yang diduga PNS mengenakan baju Paslon nomor urut dua, sambil menunjukan dua jari mereka ke kamera.

Meski pun sempat menunggu sekitar 15 menit, puluhan demonstran akhirnya bertemu dengan pejabat Walikota Yogyakarta, Sulistyono.

### Rekomendasi panwas

Ia mengatakan sudah menerima rekomendasi yang diberikan oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan akan segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

Sulistyono menjelaskan bah-

wa ia akan menindak tegas Aparatur Sipil Negara yang tidak netral pada Pilkada Kemarin.

"Namun semuanya kan butuh proses, kita akan menunggu hasil dari Panwaslu terkait masalah ini," kata Sulistyono pada puluhan demonstran.

Inspektur Kota Yogyakarta, Wahyu menjelaskan akan melakukan proses sesuai dengan perundangan yang berlaku. "Kalau bisa dibuktikan dengan mudah ya bisa cepat, tapi kalau ada persoalan mungkin bisa panjang. Kita apa adanya lah kita proses sesuai aturan," kata Wahyu.

Jika terbukti ada PNS yang melakukan pelanggaran, minimal akan dikenai sanksi turun pangkat tiga

tahun, dan akan dilihat apakah menggunakan fasilitas negara.

"Kalau sudah diperiksa oleh pihak berwenang maka kita tidak boleh ikut campur," lanjut Wahyu.

Ketentuan netralitas PNS ini sesuai dengan surat edaran nomor B/2355/M.PAN-RB/07/2015 dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, tentang netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Larangan Penggunaan Aset Pemerintah dalam pemilihan kepala daerah serentak. Dalam surat itu diatur ASN diminta untuk menjaga netralitas dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Tidak menggunakan aset pemerintah dalam kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, seperti ruang rapat/aula, kendaraan dinas dan perlengkapan kantor lainnya.

Bagi Pegawai ASN yang tidak menaati ketentuan dan melakukan pelanggaran terhadap larangan dijabuti hukuman disiplin sedang sampai berat sesuai perundang-undangan.

Aksi tersebut diamankan oleh anggota gabungan dari Pol PP, Linmas, dan pihak kepolisian yang mengerahkan sekitar 70 personil di depan Balai Kota Yogyakarta. (trs)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. BKPP			

Yogyakarta, 11 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005